

Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Keuangan Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang

Gunarty¹, Ayu Asfarina², Adam Latif³, Zainuddin⁴

^{1,2,3,4}Magister Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan, Indonesia
gunarty12@gmail.com

Abstrak: Data awal ada kecenderungan terjadinya kesenjangan antara dimensi normative yang menekankan bahwa dalam mewujudkan desentralisasi kewenangan, khususnya otonomi fiskal melalui otonomi daerah harus didukung oleh potensi sumber PAD yang diakumulasikan dalam bentuk postur APBD yang rasional dan proporsional. Namun pada kenyataannya postur APBD yang diharapkan mampu menjalankan fungsinya secara efektif belum juga dapat diwujudkan. Kesenjangan tersebut terjadi disebabkan karena rendahnya kinerja pengelolaan keuangan pada Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang. Tujuan Penelitian untuk : (1) Menganalisis pengaruh Sistem Informasi Manajemen Keuangan terhadap kinerja pengelolaan keuangan; (2) Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi sistem informasi manajemen keuangan; dan (3) Menganalisis dampak kinerja pengelolaan keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif tabel persentase dan analisis statistik regresi linear sederhana dengan skala Likert. Untuk menguji pengaruh sistem informasi manajemen keuangan terhadap kinerja pengelolaan keuangan: (1) deskriptif tabel persentase 55,18%; dan (2) statistik regresi linier sederhana 79,99% berpengaruh secara signifikan pada taraf 5% ($t_{hit} 4,32 > t_{tab} 2,55$). Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem informasi manajemen keuangannya yaitu : (1) profesionalisme 50,00%; dan (2) kepemimpinan 41,67%. Dampak kinerja pengelolaan keuangan: (1) opini BPK yang memberikan kategori disclaimer pada pemerintah Kabupaten Enrekang pada tahun 2015; dan (2) kualitas APBD, tidak memenuhi standar kinerja pengelolaan keuangan, yaitu: penyusunan dan pelaporan APBD tidak tepat waktu; realisasi penerimaan APBD belum memperlihatkan peningkatan yang signifikan.

Kata Kunci: Sistem Informasi Manajemen, Keuangan, Kinerja, dan Keuangan

I. PENDAHULUAN

Otonomi daerah adalah pelimpahan wewenang dari pemerintahan tingkat pusat kepada pemerintahan daerah. Pelimpahan kewenangan ini bertujuan untuk mencapai

penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien. Konsep *Good Governance* atau tata laksana pemerintahan yang baik menjadi salah satu wacana dalam pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik di

Indonesia. Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, merupakan jawaban atas penyelenggaraan manajemen pemerintahan dan pemberian kewenangan yang bertanggungjawab, adalah cerminan proses demokratisasi dalam pelaksanaan otonomi daerah yang merupakan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota untuk membantu pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah.

Pemerintah daerah wajib mengurus rumah tangganya dengan potensi dengan beban yang harus ditanggungjawabinya. Otonomi fiskal daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD seperti pajak, retribusi dan lain-lain.

Dalam melaksanakan amanat rakyat, pengelolaan keuangan Negara atau daerah harus transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu dalam pengalokasian biaya dalam penyusunan APBN dan APBD harus dilaksanakan dengan pendekatan prestasi kerja. Yang pengalokasiannya harus direncanakan dan dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau

hasil ingin dicapai oleh organisasi. Pendekatan prestasi kerja dan konsep manajemen kinerja merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan program atau aktivitas pada pemerintah yang ditujukan dalam rangka mencapai hasil yang dapat memenuhi kebutuhan stakeholders (Safri, 2005: 99)

Secara empirik berdasarkan pengamatan awal penelitian terhadap kinerja pengelolaan keuangan pada Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang, maka diperoleh data awal ada kecenderungan terjadinya kesenjangan antara dimensi normative yang menekankan bahwa dalam mewujudkan desentralisasi kewenangan, khususnya otonomi fiskal melalui otonomi daerah harus didukung oleh potensi sumber PAD yang diakumulasikan dalam bentuk postur APBD yang rasional dan proporsional. Namun pada kenyataannya postur APBD yang diharapkan mampu menjalankan fungsinya secara efektif belum juga dapat diwujudkan. Kesenjangan tersebut terjadi disebabkan karena rendahnya kinerja pengelolaan keuangan pada Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang.

Berdasarkan pada masalah rendahnya kinerja

pengelolaan keuangan tersebut, maka dapat diasumsikan sementara bahwa salah satu dimensi yang menyebabkan adanya fenomena tersebut adalah penerapan sistem informasi manajemen keuangan belum dilakukan secara efektif, efisien, rasional, dan produktif berdasarkan subsistem yang termuat dalam sistem informasi manajemen keuangan itu sendiri sebagaimana yang dirumuskan oleh Kadir (2003: 90). Dengan demikian, maka dapat diungkapkan beberapa gejala, yaitu dalam kurun waktu tiga bulan: (1) identifikasi sumber penerimaan keuangan dan penggunaan APBD belum dilakukan secara efektif; (2) pemeriksaan arus keuangan baik yang bersifat financial maupun nonfinansial dan asset daerah; (3) pendataan dan pengkodean transaksi keuangan belum dimasukkan dalam format jurnal keuangan secara efektif; (4) penyusunan rencana penerimaan berdasarkan target PAD belum dilakukan secara rasional; (5) pengawasan terhadap penerimaan dan penggunaan APBD belum dilakukan secara efektif dan belum memberikan informasi keuangan yang akurat dan actual kepada Stakeholder.

Pada dimensi kelayakan, masalah tersebut didukung oleh beberapa hasil penelitian terdahulu yang juga mengkaji

dimensi sistem informasi manajemen keuangan dan dimensi kinerja pengelolaan keuangan, yaitu: (1) Irwanto (2006) mengangkat masalah Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo; (2) Mardiyanto (2010) tentang Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Keuangan Terhadap Kualitas Manajemen Keuangan Pada Badan pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dalam rangka mengungkap secara jelas dan berupaya memberikan solusi dan jawaban atas permasalahan masih rendahnya kinerja pengelolaan keuangan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang dengan menetapkan judul penelitian "Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Terhadap kinerja Pengelolaan Keuangan Pada Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang" dengan tujuan Untuk menganalisis pengaruh penerapan Sistem Informasi Manajemen keuangan terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pada Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang,

Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Sistem Informasi Manajemen keuangan Pada Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang dan Untuk menganalisis dampak kinerja pengelolaan keuangan Pada Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang.

A. Konsep Sistem Informasi Manajemen Keuangan

Sistem informasi dapat membantu Organisasi atau lembaga pemerintah unggul dalam bersaing di pasar. Strategi sistem informasi ini menggunakan teknologi informasi untuk menghasilkan produk, jasa, proses, dan kemampuan yang membuat Organisasi atau lembaga pemerintah unggul dibandingkan dengan Organisasi atau lembaga pemerintah lainnya. Sedangkan dimensi Sistem Informasi Manajemen dengan pemanfaatan teknologi yang digunakan dapat berperan besar dalam menerapkan berbagai macam strategi, seperti: (1) Strategi biaya, dengan menggunakan teknologi informasi Organisasi atau lembaga pemerintah dapat memproduksi dengan biaya lebih murah; (2) Strategi diferensiasi, merupakan cara menggunakan teknologi informasi untuk membuat suatu produk dan jasa lebih menarik untuk unggul dari kompetitor; (3) Strategi inovasi, bagaimana untuk

memperkenalkan produk dan jasa yang unik yang belum pernah ada sebelumnya dengan melibatkan unsur teknologi informasi agar menarik pelanggan. Sistem Informasi Manajemen dapat juga dimanfaatkan dalam proses pengambilan keputusan sehingga tepat sesuai dengan data yang ada. Karena Sistem Informasi Manajemen berisi data-data dan informasi yang akurat sehingga bisa meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam pengambilan keputusan (Gatiningsi, 2013: 90).

Saat mengolah data untuk menghasilkan dan mengetahui suatu informasi dalam menentukan kebijakan atau pengambilan suatu keputusan dalam organisasi maka dibutuhkan suatu Sistem Informasi Keuangan. Dalam menjalankan suatu usaha pada organisasi selain sistem dan informasi, dibutuhkan juga dana. Output dihasilkan dari fungsi sistem itu sendiri dalam memproses data dan fungsi keuangan terkait arus uang di dalam organisasi. Jadi dalam menjalankan atau mendukung suatu produksi pemasaran dibutuhkan dana dan modal.

Sistem informasi keuangan mempunyai tiga tugas pokok : (1) Mengidentifikasi; (2) Memperoleh; dan (3) Mengontrol penggunaan dana dalam suatu organisasi (Ridwan, 2009: 111). Ada beberapa fungsi Sistem Informasi Keuangan Daerah

menurut Bastai (2001: 55), yaitu: (1) Membantu pemerintah daerah menjalankan tanggung jawabnya untuk mengelola keuangan daerah; (2) Menyusun laporan keuangan yang akurat; (3) Menyajikan informasi secara akurat dan efisien yang digunakan bagi pengguna. Pondasi pembangunan yaitu seluruh sub-sub sistem yang ada dimana CBIS (*Computer Based Information System*) adalah yang memproses seluruh data. Hal ini berguna dalam pemrosesan data untuk memelihara dan menghasilkan record organisasi yang up-to-date. Subsistem berorientasi pada informasi yang terdapat dalam semua sistem informasi. Aplikasi yang dibutuhkan oleh elemen di dalam lingkungan, khususnya pemerintah, masyarakat keuangan, dan para pemegang saham. Pemrosesan Data bertujuan memberikan informasi untuk pemecahan suatu masalah, memberikan data yang lengkap, dan menjalankan tugas. Subsistem utama dari berbagai jenis organisasi ditampilkan dalam bentuk data yang terproses yang merupakan hasil dari perpaduan arus data yang terbentuk untuk memproses data.

Subsistem Internal Audit dibuat khusus terkait pengoperasian organisasi. Pihak yang terkait di dalamnya adalah auditor internal yang bekerja di dalam organisasi yang biasanya terkait dalam pekerjaan

perancangan dan evaluasi sistem informasi konseptual seluruh organisasi. Dan pengedit dalam organisasi kadang-kadang membuat laporan hasil keuangan dan memberikan kepada yang lebih diatas. Karena mempunyai kemampuan untuk mengukur serta mempengaruhi operasi organisasi secara independen, dilihat dari sudut pandang keuangan, Auditor internal dianggap mempunyai subsistem input dari informasi keuangan dari sudut pandang keuangan.

Kegiatan suntikan dana dan penambahan dan dengan melacak sumber modal tambahan, dengan mengumpulkan data, informasi dari masyarakat keuangan dan pemegang saham serta informasi pemerintah mempengaruhi jalannya suatu keuangan yang berasal dari pemerintah daerah dan negara merupakan kegiatan dari Subsistem Intelejensi Keuangan.

Sistem Informasi Keuangan subsistem (*CBIS*) adalah sistem yang mendapatkan suatu organisasi baik di dalam maupun diluar organisasi terkait permasalahan keuangan yang terjadi kepada orang dalam organisasi tersebut. Informasi yang diberikan dalam bentuk laporan periodik dan laporan khusus, hasil dari simulasi dan saran pakar matematika dan komunikasi elektronik.

B. Konsep Kinerja Pengelolaan Keuangan

Menurut Mardiasmo (2002 : 121) bahwa Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah sistem yang dibuat untuk membantu dalam penilaian suatu strategi oleh manajer publik melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Pengukuran kinerja keuangan dapat diartikan sebagai sistem non keuangan atau keuangan dari pekerjaan sehingga dapat di capai suatu aktivitas suatu organisasi. Kinerja keuangan adalah bentuk bagaimana pertanggungjawaban yang dilaporkan terkait pengeluaran sesuai dengan periode yang ditentukan berdasarkan UU yang berlaku dengan berbentuk perhitungan APBD.

Tujuan dan manfaat yang diukur dalam kinerja keuangan pemerintah Daerah, dapat diukur nya keberhasilan dalam melaksanakan program sehingga tercapainya prestasi yang baik. Yang jika dilakukan secara berkelanjutan dapat memberikan umpan balik untuk perbaikan secara *continue* agar tercapainya tujuan organisasi di lain waktu. Cara mengetahui bagaimana kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah, salah satu alatnya dengan melakukan penganalisan secara mendalam terhadap APBD yang ditetapkan dan dilaksanakan (Sri Wahyuni, 2008: 88).

Indikatornya yaitu: (1) menganalisis Surplus/Defisit APBD untuk pemantauan fiskal kebijakan pemerintah daerah. dengan dua pendekatan dari (PP 58 Tahun 2005) yaitu: $\text{surplus/deficit} = \text{Pendapatan Suatu Daerah} - \text{belanja suatu daerah}$, sedangkan menurut PMK (Peraturan Menteri Keuangan) No 72 tahun 2006 yaitu $\text{surplus atau defisit} = \text{pendapatan belanja} + \text{Silpa atau sisa lebih pembiayaan anggaran} + \text{Pencairan cadangan Dana}$; (2) derajat fiskal desentralisasi (DDF). Pemerintah Daerah dan Pusat menunjukkan DDF dengan Variabel Seperti: $\text{total Penerimaan Daerah (TPD)}$; $\text{Perbandingan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pemerintah (BHPBP)}$ terhadap TPD; $\text{Rasio Sumbangan (SPD) Bantuan Daerah daripada TPD}$; (3) (DOF) Derajat Ekonomi Fiskal. Kemandirian Keuangan Daerah adalah kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatannya dalam membangun dan Melayani masyarakat yang dihasilkan dari retribusi dan pajak yang dibayar oleh masyarakat sebagai sumber penghasilan yang diperlukan daerah; (4) Upaya Fiskal/Posisi Fiskal. Rasio antar kapasitas pembayaran suatu daerah dengan penerimaan pajak diartikan sebagai usaha pajak. Saat PDRB meningkat, otomatis dalam membayar pajak merupakan kemampuan daerah juga meningkat. Indikator yang dapat

digunakan sebagai kemampuan membayar pajak masyarakat. Dengan adanya administrasi penerimaan daerah berarti dapat meningkatkan daya pajak; (5) kemampuan pemerintah mampu menganalisis dalam merealisasi PAD yang sudah direncanakan, dengan target yang telah ditentukan; (6) untuk mengetahui pajak dan retribusi daerah termasuk dalam kategori yang mana antara potensial, prima, terbelakang dan berkembang (7) Rasio mandiri Daerah digunakan dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dan pola hubungan yang ada; (8) Kemampuan Pinjaman Daerah (DSCR) merupakan kemampuan untuk memperoleh uang yang dengan mempercepat kondisi ekonomi serta dengan meningkatkan pelayanan publik baik mandiri ataupun dengan bantuan dari pihak lain (PP No 56 tahun 2005).

C. Keuangan Daerah

Ketentuan mengenai keuangan daerah terdapat dalam UUD No 33 Thn 2004 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah daerah dan pusat. Dalam Bab III Pasal 4 ayat (1), UU Nomor 33 Thn 2004, ditegaskan bahwa "Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah". Artinya, dalam melaksanakan wewenang daerah

tersebut memerlukan dana tambahan dari pusat ke daerah. Bertambahnya wewenang suatu daerah jelas-jelas akan membutuhkan dana tambahan bagi suatu daerah atau sebaliknya. Dengan berkurangnya dan atau anggaran untuk hal tersebut. Selama ini dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah sebagian besar dibiayai oleh pusat melalui bantuan pusat atau subsidi daerah otonom. Pemerintah daerah sendiri tidak akan bisa melaksanakan suatu fungsi dalam memberikan pelayanan dalam pembangunan dengan baik tanpa adanya biaya yang sangat memadai. Dilihat dari pentingnya posisi keuangan tersebut.

Keuangan adalah salah satu kriteria dasar dalam mengetahui kemampuan suatu Daerah dalam mengatur mengurus rumah tangganya. Dengan demikian dalam mengurus dan mengatur urusan rumah tangganya, daerah membutuhkan biaya. Kurangnya anggaran, maka tidak mungkin bagi daerah untuk melaksanakan kewajiban dan wewenangnya dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya. Hal ini menjadi pokok yang didasari dari suatu daerah otonom yang hilang.

Untuk dapat terpenuhinya keuangan yang memadai maka daerah membutuhkan suntikan dana yang cukup. Dengan penggunaan pendekatan kinerja, daerah dituntut agar lebih

terampil dalam proses penyusunan maupun pelaksanaan APBD. Peraturan pemerintah sendiri sudah memberikan arahan secara umum kepada pemerintah daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD tersebut.

Penyelenggaraan keuangan daerah akan berjalan dengan baik dan optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintah diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan dari daerah itu cukup. Besar kecilnya alokasi sumber penerimaan daerah disesuaikan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta mengacu pada Perimbangan Keuangan yang diatur dalam Undang-undang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

D. Faktor yang Mempengaruhi Sistem Informasi Manajemen Keuangan

a. Dimensi profesionalisme.

Adalah inti dari suatu profesi. Orang yang bergabung dengan kelompok profesi memiliki pengetahuan dan keahlian yang tidak dimiliki kebanyakan orang lain. Profesi anggota ini diatur sesuai dengan kode etik yang berlaku dan menyatakan mampu serta memiliki integritas yang baik. (Cruess & Cruess) (dalam Sigian, 2005: 90).

Profesionalnya anggota melalui dari sikap dan komitmen dalam bekerja melalui kode etik profesi dan standar yang baik. Konsep ini banyak ydi dalam penelitian yang dikembangkan oleh Hall dengan memandang yang tercermin dari perilaku mereka melalau profesi yang dimiliki. Ada beberap ciri atau sidat secara umum yaitu : (1) adanya pengetahuan yang khusus dari pelatihan dan pendidikan serta pengalaman yang bertahun tahun; (2) memiliki standar moral yang tinggi dan kaidah yang baik (3) pengabdian kepada masyarakat, yakni meletakkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi.adanya ciri umum suatu profesi maka disimpulkan kaum ini memiliki perilaku diatas rata-rata. Di lain pihak ada hak yang sangat berat tetapi di lain pihak ada pola prilaku yang baik demi kepentingan masyarakat.

b. Dimensi Kepemimpinan

Kepemimpinan diartikan proses mengarahkan dan menengaruhi pegawai melakukan pekerjaab yang diberikan kepada mereka. Griffin (2000) 2 konsep pengertian kepemimpinan (1) sebagai proses maksudnya adalah yang difokuskan apa yang dalukan oleh para pimpinan menggunakan pengaruhnya untuk memperjelas suatu tujuan bagi para bawahn atau untuk di motivasi, bawahan, atau yang dipimpinnya, mereka

untuk menciptakan suatu organisasi yang budayanya produktif dengan mencapai tujuan organisasi; dan (2) sebagai atribut, sekumpulan pimpinan yang memiliki atribut dengan karakteristik yang dimiliki oleh pimpinan. Sehingga pemimpin dapat diartikan sebagai seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain dengan menggunakan kekuasaan sebagai pemimpinnya untuk menerima dirinya sebagai sosok yang layak memimpin mereka (Sedarmayanti, 2003: 150).

Sejalan hal tersebut, maka Teori X dan Teori Y sebagaimana yang dirumuskan oleh McGregor. bahwa pemimpin memiliki strategi dimana setiap manusia memiliki. McRegor memberikan dua anggapan manajer dalam industri. Anggapan-anggapan sebagai berikut;(a) pembawaan tidak menyukai pekerjaan (b) Karena karakteristik manusia tersebut, orang harus dipaksa dan diawasi dalam menjalankan tugas untuk mencapai suatu tujuan organisasi; (3) standar manusia lebih, menyukai diarahkan menghindari tanggung jawab dan keamanan dan jaminan hidup diatas segalanya. Sedangkan anggapannya sebagai berikut (a) Teori X satu pembawaan manusia malas atau tidak suka dengan pekerjaan, (b) Teori Y : (1) hanya ingin bermain dan beristirahat; (2) pengawasan serta ancaman untuk

menghukum bukanlah cara untuk mencapai tujuan organisasi. Orang akan melakukan pengendalian dalam mengarahkan dirinya untuk mencapai tujuan yang telah disepakati (3) keterikatan yang memiliki fungsi dari penghargaan dengan prestasi yang diberikan; (4) manusia biasanya memiliki hubungan yang layak belajar tidak hanya dengan menerima tetapi mempunyai tanggung jawab; (5) ada pengetahuan yang banyak sehingga dikatakan cerdas dan kreatifitas dalam menyelesaikan masalah secara menyeluruh kepada karyawan; (6) petensi intelektual biasanya manusia digunakan sebagian saja dalam kehidupan industri modern (Fernada, 2003: 90).

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode survei. Survei dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, sehingga tidak seluruh objek diteliti, tetapi hanya perwakilan saja sebagai persentase dari semua objek tertentu. Penelitian ini yang menjadi populasi, yaitu sebagian dari pegawai yang bekerja pada Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang sebanyak 42 orang. Untuk penerikan sampel dilakukan secara purposif sumpling (sampel jenuh) yaitu mengambil keseluruhan populasi

untuk dijadikan sebagai sampel karena jumlah populasinya kurang dari 100 orang (Arikunto, 2002:89). Dengan demikian jumlah sampel penelitiann dan sekaligus ditetapkan sebagai responden adalah sebanyak 42 orang. Adapun jenis data yang digunakan data sekunder dan primer, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuisisioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan teknik analisis data yaitu analisis infrensial, Regresi Linear Sederhana.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh Sistem Informasi Manajemen terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan.

a. Intelejen keuangan

Efektivitas kegiatan identifikasi sumber penerimaan bantuan keuangan dalam bentuk pinjaman dan hiba dari pihak ketiga, khususnya pada dimensi subsistem intelejen keuangan maka klasifikasi jawaban responden dapat dirinci sebagai berikut: Cukufektif 17 orang atau %; efektif 7 orang atau 16,67%; dan kurang efektif 10 orang atau %. Hal ini membuktikan bahwa secara keseluruhan pegawai Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang belum melakukan identifikasi terhadap

penerimaan bantuan baik dalam bentuk pinjaman mauoun dalam bentuk hiba pihak ketiga.

Bantuan keuangan danm hiba yang diperoleh dari pihak ketiga merupakan salah satu dimensi didalam Pengelolaan keuangan daerah yang harus dikelola secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab, bermanfaat, serta taat pada peraturan UU untuk masyarakat. Proses Pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan dan penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) termasuk didalamnya adalah bantuan keaungan dari ketiga pihak harus diketahui oleh DPRD. Dimana APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggara .Penyusunan APBD berpedoman dari RKPD untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan negara. Sesuai dengan UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah 181 dan Undang-undang No 17 tahun 2003 tentang keuangan negara pasal 17-18, yang disesuaikan pada tempatnya, rencana Kerja Pemerintah Daerah dan kebijakan APBD yang telah disepakati antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.

Penerapan Sistem Informasi Manajemen keuangan, khususnya pada dimensi subsistem intelejen keuangan terkait dengan efektivitas identifikasi asset pemerintah

daerah, maka klasifikasi jawaban responden dapat dirinci sebagai berikut: efektif 27 orang atau 64,29%; dan teridentifikasi 7 orang atau 37,71%. Hal ini membuktikan bahwa secara keseluruhan pegawai Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang belum secara optimal melakukan identifikasi asset pemerintah daerah secara efektif.

b. Audit keuangan

Efektivitas pemeriksaan terhadap sumber penerimaan keuangan berdasarkan postur APBD khususnya pada dimensi subsistem audit keuangan, maka klasifikasi jawaban responden dapat dirinci sebagai berikut: Cukup efektif 33 orang atau 78,58%; dan efektif 9 orang atau 24,42%. Data ini dibuktikan bahwa secara keseluruhan pegawai Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang sudah melakukan kegiatan pemeriksaan secara efektif terhadap sumber-sumber penerimaan keuangan berdasarkan postur APBD.

Efektivitas pemeriksaan terhadap sumber-sumber penerimaan keuangan daerah dalam bentuk PAD merupakan upaya pemerintah dalam menyusun APBD yang representative, sehingga dapat diperoleh rumusan anggaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini

anggaran pendapatan ini memiliki rencana pembangunan dengan mengaitkan pendekatan yang sistematis dalam proses penyusunan suatu anggaran dengan penyusunan anggaran terkait dokumen perencanaan seperti: Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD); Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); kebijakan umum anggaran (KUA); dan Prioritas dan Platform Anggaran Sementara (PPAS) sedangkan tingkat Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dokumen tersebut sebagai berikut Rencana Strategik; Rencana Kerja (RENJA)) SKPD; dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD.

Penggunaan anggaran keuangan berdasarkan postur APBD khususnya pada dimensi subsistem audit keuangan, maka klasifikasi jawaban responden dapat dirinci sebagai berikut: Cukup efektif 33 orang atau 78,58%; dan efektif 9 orang atau 24,42%. Hal ini membuktikan bahwa secara keseluruhan pegawai Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang sudah melakukan kegiatan pemeriksaan secara efektif terhadap penggunaan anggaran keuangan berdasarkan postur APBD.

Penggunaan APBD berdasarkan kewenangan anggaran yang sudah ditetapkan dalam bentuk Perda perlu dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui dan mengevaluasi

ketepatan penggunaan anggaran tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, maka Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) mempunyai fungsi, yaitu : (1) Fungsi Otorisasi; (2) Fungsi Perencanaan; (3) Fungsi Pengawasan; (4) Alokasi; (5) Distribusi; (6) dan Stabilisasi.

Efektivitas pemeriksaan terhadap realisasi penerimaan berdasarkan target PAD khususnya pada dimensi subsistem audit keuangan, maka klasifikasi jawaban responden dapat dirinci sebagai berikut: Cukup efektif 30 orang atau 71,42%; dan efektif 12 orang atau 28,58%. Dengan dibuktikan secara keseluruhan pegawai Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang sudah melakukan kegiatan pemeriksaan secara efektif terhadap realisasi penerimaan keuangan berdasarkan target PAD.

c. Pemerosesan transaksi

Pembiayaan dirinci menurut sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan dari penerimaan daerah lain, yaitu sisa yang lebih anggaran tahun lalu dengan penerimaan dari penjualan aset daerah yang dipisahkan. Pembiayaan merupakan sumber hutang pokok. Surplus anggaran adalah selisih lebih pendapatan daerah terhadap belanja, dan defisit anggaran adalah selisih kurang

Pendapatan terhadap Belanja Daerah (Mulyana 2006).

d. Peramalan dan perencanaan keuangan.

Rasionalisasi penetapan target penerimaan keuangan PAD khususnya pada dimensi subsistem peramalan dan perencanaan keuangan, maka klasifikasi jawaban responden dapat dirinci sebagai berikut: Cukup rasional 25 orang atau 59,52%; dan rasional 17 orang atau 40,48%. Hal ini membuktikan bahwa secara keseluruhan pegawai Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang sudah melakukan penetapan target penerimaan PAD secara rasional.

Penetapan target penerimaan keuangan dari berbagai sumber penerimaan PAD harus dilakukan secara proporsional dan rasional berdasarkan potensi sumber keuangan daerah. Oleh karena rasionalisasi penetapan target penerimaan PAD tersebut sangat mempengaruhi Struktur keuangan daerah berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 yang menayakan bahwa struktur keuangan merupakan ksatuan dari pendapatan daerah dan pembiayaan. Dalam dengan ini Dokumen APBD merupakan seluruh rangkuman kegiatan jenis pendapatan dan belaja serta sumber pembiayaan meliputi PAD, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang

sah. Menurut jenis pendapatan misalnya, retribusi daerah, pajak daerah, alokasi dana umum dan alokasi dana khusus (Mulyana 2006).

Efektivitas pencapaian target penerimaan keuangan yang bersumber dari PAD khususnya pada dimensi subsistem peramalan dan perencanaan keuangan, maka klasifikasi jawaban responden dapat dirinci sebagai berikut: Cukup efektif 30 orang atau 71,42%; dan efektif 12 orang atau 28,58%. Hal ini membuktikan bahwa secara keseluruhan pegawai Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang sudah melakukan kegiatan pemeriksaan secara efektif terhadap pencapaian target penerimaan keuangan berdasarkan target PAD.

Efektivitas pencapaian target penerimaan keuangan merupakan satu kesatuan kegiatan yang meliputi pelaksanaan, perencanaan, pertanggungjawaban, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan keuangan daerah.

e. Pengendalian keuangan

Kegiatan pemeriksaan terhadap efektivitas pelaksanaan evaluasi penerimaan dan pemanfaatan PAD berdasarkan postur APBD khususnya pada dimensi subsistem pengendalian keuangan, maka klasifikasi jawaban responden dapat dirinci sebagai berikut: Cukup efektif 27

orang atau 64,29%; dan efektif 15 orang atau 35,71%. Hal ini membuktikan bahwa secara keseluruhan pegawai Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang sudah melakukan kegiatan evaluasi secara efektif terhadap penerimaan dan pemanfaatan keuangan berdasarkan postur APBD.

Sejalan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah daerah dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan dan kesalahan yang lebih besar terhadap pengelolaan keuangan, maka dilakukan evaluasi penerimaan keuangan berdasarkan sumber-sumber PAD yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi perbaikan dan penyempurnaan kebijakan anggaran belanja APBD pada tahun berikutnya. Diera reformasi dalam pengelolaan keuangan dengan berbagai perubahan dari berkembangnya zaman. Perubahan ini untuk mengetahui bagaimana menciptakan good governance dan clean government dengan tata kelola yang baik.

Kegiatan pemeriksaan terhadap realisasi penerimaan berdasarkan target PAD khususnya pada dimensi subsistem pengendalian keuangan, maka klasifikasi jawaban responden dapat dirinci sebagai berikut: Cukup efektif 27 orang atau 64,29%; dan efektif 15

orang atau 35,71%. Hal ini membuktikan bahwa secara keseluruhan pegawai Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang sudah melakukan kegiatan pengawasan secara efektif terhadap penerimaan dan pengeluaran keuangan berdasarkan postur APBD.

Efektivitas pelaporan penerimaan dan penggunaan anggaran keuangan PAD berdasarkan postur APBD khususnya pada dimensi subsistem pengendalian keuangan, maka klasifikasi jawaban responden dapat dirinci sebagai berikut: Cukup efektif 30 orang atau 71,42%; dan efektif 12 orang atau 28,58%. Dengan ini dapat dibuktikan secara keseluruhan pegawai Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang sudah melakukan kegiatan pelaporan secara efektif terhadap penerimaan dan penggunaan keuangan PAD berdasarkan postur APBD.

Anggaran Pembangunan Belanja Daerah merupakan perwujudan Keuangan Daerah disusun dalam bentuk kuantitatif dalam satuan moneter untuk suatu periode (satu tahun). Oleh karena itu perlu dilakukan pelaporan secara proporsional dan komprehensif terhadap penerimaan dan penggunaan PAD. semua penerimaan daerah melalui pendapatan daerah semua

menjadi hak daerah .Belanja daerah semua beban Daerah termasuk pengeluaran suatu anggaran.

Efektivitas perubahan APBD berdasarkan kebutuhan Anggaran khususnya pada dimensi subsistem pengendalian keuangan, maka klasifikasi jawaban responden dapat dirinci sebagai berikut: Cukup efektif 23 orang atau 54,77%; dan efektif 19 orang atau 45,23%. Hal ini membuktikan bahwa secara keseluruhan pegawai Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang sudah melakukan perubahan APBD secara efektif terhadap APBD berdasarkan kebutuhan belanja APBD.

Pengaruh penerapan sistem informasi manajemen keuangan sebagai variabel pengaruh (X), dengan indikaor: subsistem intelegen keuangan; subsistem audit keuangan; subsistem pemerosesan transaksi; subsistem peramalan dan perencanaan keuangan; dan subsistem pengendalian keuangan terhadap kinerja pengelolaan keuangan sebagai variabel terpengaruh (Y) pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang, secara parsial digunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS (Statistical Package for social Science) versi 21.0, pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen,

$$Y = 0,289 + 0,145X + e$$

Dari hasil regresi linier sederhana tersebut di atas menunjukkan bahwa variabel sistem secara signifikan Informasi Manajemen keuangan berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan. Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa nilai Kinerja Pengelolaan keuangan (variabel Y) akan bertambah sebanyak nilai penerapan sistem informasi manajemen keuangan (variabel X) jika variabel lainnya dalam keadaan konstan atau variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Untuk membuktikan hipotesis ini mengasumsikan semetara bahwa penerapan sistem informasi manajemen keuangan (variabel X) berpengaruh secara signifikan dan secara nyata terhadap kinerja pengelolaan keuangan (variabel Y), maka digunakan uji hipotesis yaitu uji t.

Persamaan ini memiliki nilai tingkat yang signifikan 0,0000 yaitu < dibandingkan nilai tingkat signifikansi (0,05). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan menolak H₀, menerima H₁ dalam artian bahwa: penerapan sistem informasi manajemen keuangan (X), dengan indikator: subsisten intelegen keuangan; subsistem audit keuangan; subsistem pemerosesan transaksi; peramalan yang tersistem dan yang mengendalikan keuangan terhadap kinerja pengelolaan keuangan (Y) pada Badan

pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang.

B. Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan

a) Profesionalisme

Tanggung jawab pegawai dalam menerapkan sistem informasi manajemen keuangan, maka klasifikasi jawaban responden dapat dirinci sebagai berikut: Cukup bertanggung jawab 27 orang atau 64,29%; dan bertanggung jawab 15 orang atau 35,71%. Hal ini membuktikan bahwa secara keseluruhan pegawai Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang sudah mampu menerapkan sistem informasi manajemen keuangan secara efektif dan bertanggung jawab atas hasil yang dicapai.

Tanggung jawab seorang pegawai terhadap pekerjaan yang menjadi tugas dan kewenangannya merupakan cerminan bagi keberhasilan atau kinerja organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu para pegawai harus memandang profesinya sebagai bentuk sikap dan perilakunya. Prinsip dimensi tanggung jawab antara lain: (1) afiliasi; (2) kebutuhan untuk meraih kinerja yang tinggi; (3) keyakinan terhadap keberhasilan dalam melaksanakan pekerjaan; (4) merupakan kriteria yang digunakan untuk mengukur

derajat sikap profesional seseorang.

Tanggung jawab pegawai dalam menerapkan sistem informasi manajemen keuangan, maka klasifikasi jawaban responden dapat dirinci sebagai berikut: Cukup bertanggung jawab 27 orang atau 64,29%; dan bertanggung jawab 15 orang atau 35,71%. Hal ini membuktikan bahwa secara keseluruhan pegawai Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang sudah mampu menerapkan sistem informasi manajemen keuangan secara efektif dan bertanggung jawab atas hasil yang dicapai.

b) Kepemimpinan

Intensitas pimpinan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan dalam sistem informasi manajemen keuangan, maka klasifikasi jawaban responden dapat dirinci sebagai berikut: Cukup intens 20 orang atau 47,62%; intens 15 orang atau 35,71%; dan kurang intens atau 16,67%. Hal ini membuktikan bahwa pimpinan mempunyai keseriusan untuk memberikan petunjuk secara intens terhadap bawahan dalam menerapkan sistem informasi manajemen keuangan secara efektif.

Intensitas Pimpinan Melakukan Supervisi Terhadap Pekerjaan Bawahan dalam Menerapkan Sistem Informasi Manajemen Keuangan, maka klasifikasi jawaban responden

dapat dirinci sebagai berikut: Cukup bertanggung jawab 27 orang atau 64,29%; dan bertanggung jawab 15 orang atau 35,71%. Hal ini membuktikan bahwa secara keseluruhan pegawai Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang sudah mampu menerapkan sistem informasi manajemen keuangan secara efektif dan bertanggung jawab atas hasil yang dicapai.

C. Dampak Kinerja Pengelolaan Keuangan.

Pemilihan dengan mengukur kinerja organisasi dapat menghasilkan pengukuran yang berbeda. Dengan ini ukuran kerja sebagai berikut ini, yaitu: (1) Efektif; (2) Efisien; (3) Kualitas; (4) Produktivitas; dan (5) Ketepatan Waktu.

Dengan memperhatikan suatu jadwal yang telah diterapkan dalam Pedoman Umum Penyusunan APBD yang akan diterbitkan oleh Kemendagri. Dengan adanya indikator ini dapat melihat ada tidak reward dari anggaran pemerintah pusat melalui penetapan penyusunan dan ketepatan dalam perda APBD/P-APBD.

Masih banyak kabupaten/kota yang APBDnya bergantung dari dana perimbangan. Semakin besar total pendapatan PAD maka kemandirian pemerintah dapat mengelola keuangannya sesuai

dengan UU Nomor 28 tahun 2009.

Dengan indikator ini untuk mengukurnya agak susah karena (1) kesejahteraan rakyat itu harus jelas (2) struktur belanja kabupaten/kota sendiri yang masih terbebani dari belanja pegawai honorarium PNS Dua hal ini sangat berkaitan.

Dengan realisasi APBD yang sangat rendah akan membengkaknya SILPA, dan banyak menyebabkan rendah yang tidak sesuai dengan jadwal sehingga menumpuk dan sebaliknya. sesuai dengan prosedur tatausaha keuangan suatu daerah.

Ini menjadi suatu urusan yang disampaikan untuk LKPD bergantung laporan Akhir Masing-masing SKPD..

Format pembelanjaan dalam 2006, berdasarkan Permen No 13 tahun 2006, terdapat dua bentuk perbelanjaan yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung yaitu belanja yang langsung dianggarkan secara langsung terkait terlaksananya program dan belanja tidak langsung yaitu belanja yang tidak secara langsung yaitu belanja pegawai

Pada dimensi yang sama, fungsi penyusunan anggaran pemerintah daerah menurut Kunardjo (2007:138) (APBD) mempunyai fungsi utama yaitu : (1) Fungsi alokasi untuk menyediakan dana bagi pemerintah untuk menyiapkan sarana prasarana bagi

masyarakat yang tidak disiapkan oleh swasta atau saling melengkapi antara pemerintah daerah dan swasta; (2) Fungsi distribusi merupakan anggaran yang terkait kebijaksanaan pemerintah terkait masalah pemerataan pendapatan antar warga negara agar dapat mengurangi kesenjangan dan penerimaan pendapatan; dan (3) Fungsi stabilisasi adalah anggaran yang menyangkut masalah pemeliharaan tingkat kesempatan kerja yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang cukup memadai dan kestabilan harga.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pengaruh penerapan sistem informasi manajemen keuangan terhadap kinerja pengelolaan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Penerapan sistem informasi manajemen keuangan dilakukan sebagai upaya pemerintah Kabupaten Enrekang dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan untuk meningkatkan kualitas kinerja pengelolaan keuangan sebagai syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Sistem infotmasi manajemen keuangan sebagai instrument strategis dalam membentuk persepsi masyarakat secara positif terhadap pengelolaan

keuangan sesuai dengan posisi APBD sebagai instrument kebijakan fiscal. Secara empirik sistem informasi manajemen keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang dapat dinilai bahwa belum diterapkan secara konsisten dan proporsional sesuai dengan aturan perundang-undangan sehingga belum memenuhi criteria yang dipersyaratkan oleh BPK sebagai lembaga independen dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan baik lembaga publik maupun lembaga profit. Perolehan persentase dapat dilihat berdasarkan hasil Penelitian secara: (1) deskriptif table frekuensi, menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi manajemen keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten Enrekang, dengan capaian persentase, yaitu: subsistem intelegen keuangan 70,24%; subsistem audit keuangan 51,17%; subsistem pemerosesan transaksi 50,13%; subsistem Peramalan dan Perencanaan Keuangan 49,26%; dan subsistem pengendalian keuangan 50,00%; dan (2) statistic regresi linier sederhana, yaitu pengaruh

penerapan sistem informasi manajemen keuangan sebagai variabel X secara parsial terhadap kinerja pengelolaan keuangan sebagai variabel Y berada pada kategori “sangat nyata” pada taraf 5% ($t_{hit} 4,32 > t_{tab} 2,55$).

2. Hubungan antara dimensi sistem informasi manajemen keuangan sebagai variabel pengaruh (X) dengan dimensi kinerja pengelolaan keuangan sebagai variabel terpengaruh (Y) yang berada pada kategori “sangat nyata”, namun dalam hal dapat diketahui bahwa terdapat beberapa factor yang ikut mempengaruhi penerapan sistem informasi manajemen keuangan dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan, yaitu : (a) profesionalisme 50,00%; dan (b) kepemimpinan 41,67%.
3. Dampak kinerja pengelolaan keuangan secara nyata terlihat pada: (a) opini BPK yang memberikan kategori disclaimer pada pemerintah Kabupaten Enrekang pada tahun 2015, dimana Auditor tidak yakin terhadap sebuah LK yang diperiksa sehingga tidak memberikan pendapat apapun, karena memang tidak diberikan bukti walau sudah diminta; (b) kualitas APBD, dalam hal ini tidak memenuhi standar kinerja pengelolaan keuangan, yaitu: penyusunan dan pelaporan APBD tidak

tepat waktu; realisasi penerimaan APBD belum memperlihatkan peningkatan yang signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Irwanto, 2006, Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo. Tesis Pada Program Pascasarjana Universitas Sudirman Purwakarta.
- [2] Mardiyanto, 2010. Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Keuangan Terhadap Kualitas Manajemen Keuangan Pada Badan pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purwakarta. Tesis Pada Program Pascasarjana Universitas Pajajaran Bandung.
- [3] Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2013. Pengenalan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). <http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/333/Versi2.1.bpkp>. (Diakses 20 Mei 2013).
- [4] Budiyo, Nur. 2013. Evaluasi Keberhasilan Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Ditinjau Dari Opini BPK-RI. Tesis. Program Pascasarjana Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. Dipublikasikan. Melalui <http://www.google.com> (Diakses 18 Maret 2013).
- [5] Dadang. 2003. Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar. Tesis Hasil Penelitian Program Pascasarjana Universitas Jenderal Sudirman. Purwokerto.
- [6] Sofyan Syafri. 2010. Analisis Kritis atas Laporan Keuangan. Jakarta : Rajawali Pres.
- [7] Ridwan. 2009. Pengaruh Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi. Universitas Padjajaran: Bandung. Melalui <http://www.google.com> (Diakses 24 Maret 2013).
- [8] Sri Wahyuni (2008) "Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sragen Tesis Hasil Penelitian Program Pascasarjana Universitas Jenderal Sudirman. Purwokerto.
- [9] Jamaluddin Ahmad 2015. Metode Penelitian Administrasi Publik.
- [10] Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Tahun

- 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Lembaga Administrasi Negara.
- [11] Gatingsih. 2013. Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pemerintahan: Konsep dan Aplikasinya pada Organisasi Pemerintahan/Pemda. Jatinan gor. IPDN PRESS.
- [12] Akbar, 2002, Fungsi Manajemen Keuangan Daerah, Majalah Pemeriksaan, Edisi No. 87, oktober.
- [13] Bastian I. 2001. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Yogyakarta (ID): BPFE.
- [14] Fahmi I. 2011. Analisis Kinerja Keuangan. Bandung (ID) : Alfabeta.
- [15] Zainuddin, 2016. Birokrasi Dalam Pelayanan Publik, Ombak, Yogyakarta.
- [16] Halim A. 2002. Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah, Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta (ID): UUP AMP YKPN.
- [17] Mahmudi. 2009. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta (ID) : Erlangga.
- [18] Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta (ID) : Penerbit Andi.
- [19] Achmad Mansyur, 2010. Teori-Teori Mutakhir Administrasi Publik. Yogyakarta, Rangkang Education.
- [20] Fernada. 2003. Etika Organisasi Pemerintahan. Jakarta.